

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2015 - 2019

PENGADILAN NEGERI PARIGI



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya Review Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015-2019 Pengadilan Negeri Parigi dapat kami susun walaupun masih belum sempurna, namun saran dan kritik sangat kami perlukan untuk penyempurnaan penyusunan Renstra ini.

Review Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015-2019 ini disusun sebagai pedoman dan acuan untuk penyusunan dan perencanaan program kerja pada tahun yang akan datang serta akan memberikan arah kebijakan dan sasaran yang akan dicapai. Selain itu Renstra juga akan dijadikan bahan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai sekaligus dijadikan sebagai pedoman untuk penataan kinerja tahun berikutnya agar target yang telah ditetapkan tercapai. Review Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015-2019 ini disusun dengan memperhatikan keadaan Pengadilan Negeri Parigi secara menyeluruh, dengan tujuan menciptakan lingkungan peradilan yang modern, terpercaya serta dapat mewujudkan peradilan yang hakiki.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama, bahu membahu hingga tersusunnya Renstra ini, segala saran dan masukan untuk kesempurnaan dan perbaikan sangat kami harapkan.

PENGADILAN NEGERI PARIGI

Ketua,



EFRATA HAPPY TARIGAN, SH.,MH.

NIP. 19680611 198903 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Lampiran	iii
BAB I. Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi.....	2
BAB II. Visi, Misi dan Tujuan Pengadilan Negeri Parigi	5
1. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Parigi	6
2. Tujuan.....	9
3. Renstra PN. Parigi 2015-2019.....	12
BAB III. Arah Kebijakan dan Strategi	14
A. Arah Kebijakan dan Strategi Umum PN. Parigi	14
B. Arah Kebijakan dan Strategi PN. Parigi.....	16
BAB IV. Penutup	19
A. Kesimpulan.....	19
B. Saran.....	19
Lampiran-lampiran.	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Matriks Rencana Strategi Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2015-2019 (A. Matrix Pencapaian Kinerja).
- Lampiran II : Matriks Rencana Strategi Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2015-2019 (B. Matrix Kinerja Anggaran)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi pemerintah untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mencapai tujuan negara. Pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang transparan, akuntabel serta terukur untuk menciptakan kelangsungan pembangunan yang berdaya guna, berhasil dan bersih serta dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk itu dapat mewujudkan program, maka harus disusun rencana baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang dan strategi untuk dapat mewujudkan program yang direncanakan.

Pengadilan Negeri Parigi sebagai salah satu lembaga peradilan harus mewujudkan perikehidupan yang sejahtera, aman, tenteram, adil dan mewujudkan kepastian hukum yang memberikan manfaat bagi kelangsungan pembangunan bangsa dan negara membutuhkan berbagai program rencana dan strategi untuk dapat mewujudkan lembaga peradilan yang agung, meningkatkan kepercayaan publik serta mewujudkan keadilan yang hakiki.

Renstra Pengadilan Negeri Parigi merupakan pelaksanaan misi dalam mewujudkan visinya secara bertahap. Rencana yang sedang dilaksanakan Pengadilan Negeri Parigi pada saat ini adalah menyesuaikan dengan program Pembaruan peradilan atau *judicial reform* dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2015-2019.

Renstra sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pengadilan Negeri Parigi lima tahun ke depan, rencana strategis ini dijabarkan ke dalam program-program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan (*action plan*). Rencana strategis ini kelak di dalam perjalanannya diharapkan didukung oleh anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang oleh sarana dan prasarana serta memperhitungkan

perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Parigi, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.

Pengadilan Negeri Parigi sebagai bagian dari unit organisasi Mahkamah Agung R.I dalam menjalankan tugas dan fungsi atau kegiatannya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Tugas dan Fungsi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden Nomor: 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja kementerian lembaga, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Pengadilan Negeri Parigi sebagai berikut :

1. Kedudukan :

Pengadilan Negeri Parigi dipimpin oleh seorang Ketua / Wakil yang berada di berada di bawah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan Mahkamah Agung R.I.

2. Tugas Pokok :

Pengadilan Negeri Parigi mempunyai tugas membantu Ketua Mahkamah Agung, yang bertugas di Kabupaten Parigi Moutong dalam menjalankan tugas peradilan dan administrasi umum lainnya.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, Pengadilan Negeri Parigi, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengurusan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkara serta Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi yang berkaitan dengan persidangan perkara.
- b. Pengurusan Daftar Perkara, Administrasi Perkara, dan Administrasi

Keuangan Perkara.

- c. Pengurusan Statistik Perkara, Dokumentasi Perkara, Laporan Perkara dan Yurisprudensi.
- d. Melaksanakan Pengawasan dan pembinaan.
- e. Dan lain-lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- f. Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara yang menjadi tanggungjawab.
- g. Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi, Saran dan Pertimbangan dibidang Tupoksinya kepada Mahkamah Agung RI.

Selain dari tugas pokok diatas Pengadilan Negeri Parigi melaksanakan fungsinya sebagai berikut :

a. Fungsi Peradilan

Pengadilan Negeri Parigi sebagai pelaksana tugas untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya yang masuk dalam kompetensi dan kewenangannya.

b. Fungsi Administrasi.

Pengadilan Negeri Parigi sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum.

c. Fungsi Nasehat dan Pembinaan.

Pengadilan Negeri Parigi berfungsi atau berwenang untuk memberikan nasehat dan pertimbangan mengenai hukum kepada seorang dan atau instansi pemerintah yang memintanya serta pembinaan terhadap pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Parigi.

d. Fungsi Pengawasan

Dalam fungsi ini Pengadilan Negeri Parigi berkewajiban mengawasi tingkah laku aparaturnya secara kelembagaan juga berwenang mengawasi pengelolaan barang milik negara serta pengelolaan anggaran.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN PENGADILAN NEGERI PARIGI

Untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka harus diawali dengan tahap perencanaan yaitu penyusunan program yang berkesinambungan, dengan memperhatikan :

- a. Tingkat kebutuhan, terutama kebutuhan prioritas.
- b. Sumber daya manusia yang tersedia.
- c. Kemampuan anggaran.
- d. Kesinambungan program.
- e. Faktor-faktor penunjang dan faktor-faktor penghambat pencapaian tujuan dan sasaran program.

Penyusunan rencana kerja merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada prinsipnya satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangannya, pegawai/staf adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (client service), baik internal maupun secara eksternal kepada para pencari keadilan.

Kwalitas ketrampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas daan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk

meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM).

1. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Parigi.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Parigi tahun 2015 - 2019 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan sistim, kebijakan peradilan perundang-undangan bidang peradilan agama serta pengawasan dan pengendalian manajemen agar tercapai efektifitas, eifisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

Dalam rangka memberikan arahan dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Pengadilan Negeri Parigi. Rencana strategis Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2015 – 2019 sebagai dasar acuan kebijakan, program dan kegiatan, serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian Visi dan Misi serta Tujuan Organisasi Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2015 – 2019 Sebagi Berikut :

Dalam rangka mewujudkan harapan di masa depan Pengadilan Negeri Parigi menetapkan visi yaitu :

“Mewujudkan Pengadilan Negeri Parigi yang bermartabat dan dihormati untuk memperkokoh landasan menuju peradilan yang agung”.

Visi Pengadilan Negeri Parigi beserta jajaran di bawahnya berkehendak mewujudkan :

- a. Tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan berintegritas.
- b. Penyelesaian perkara secara tepat waktu.
- c. Mewujudkan kepuasan yang maksimal kepada masyarakat pencari keadilan.
- d. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
- e. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara profesional baik dari segi teknis dan non teknis.
- f. Terlaksananya pelayanan publik yang prima dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Asumsi Penetapan Visi.

Visi ditetapkan berdasarkan asumsi-asumsi berikut :

- a. Kondisi Mahkamah Agung yang mencakup :
 - Tuntutan penegakan supremasi hukum dalam era reformasi sekarang ini.
 - Tuntutan independensi dan peningkatan kinerja Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya.
- b. Kondisi sumber daya manusia Pengadilan Negeri Parigi dan jajaran organisasi di bawahnya selain terintegrasi dan mampu berkompetisi, juga harus mempunyai komitmen yang kuat dalam upaya mencapai visi Pengadilan Negeri Parigi.

Dasar pemikiran penetapan visi.

Dasar pemikiran penetapan visi Pengadilan Negeri Parigi adalah sebagai berikut :

- a. Peran Pengadilan Negeri Parigi sebagai salah satu *supporting unit* Mahkamah Agung dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
- b. Pengadilan Negeri Parigi mempunyai : fungsi yudikatif, fungsi pembinaan dan fungsi penyelenggara administrasi.

Untuk mencapai visi Pengadilan Negeri Parigi yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan pula misi Pengadilan Negeri Parigi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan transparansi.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
4. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran.
5. Meningkatkan kelembagaan/ organisasi peradilan yang efektif dan efisien.
6. Meningkatkan pengelolaan anggaran secara akuntabel dan transparan.
7. Meningkatkan sistem informasi yang handal dan profesional.
8. Meningkatkan ketatalaksanaan yang berkualitas.
9. Meningkatkan Penatausahaan aset negara.
10. Meningkatkan pelayanan administrasi.

Asumsi Penetapan Misi.

Misi Pengadilan Negeri Parigi ditetapkan berdasarkan asumsi- asumsi :

- a. Tingginya dukungan masyarakat dan pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan yang berkualitas, transparan dan akuntabel.
- b. Tersedianya peraturan tentang pengelolaan anggaran (Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003), Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004), pengelolaan kepegawaian dan pengelolaan sarana dan prasarana, dll.
- c. Adanya kebijakan Mahkamah Agung untuk meningkatkan kinerja, pemenuhan kebutuhan anggaran dan sarana prasarana Mahkamah Agung dan peradilan.

Dasar pemikiran penetapan misi.

Dasar pemikiran misi Pengadilan Negeri Parigi adalah sebagai berikut :

- a. Kondisi Pengadilan Negeri Parigi yang meliputi sumber daya manusia yang akan berkembang, anggaran dan sarana prasarana yang akan bertambah.
- b. Pengadilan Negeri Parigi sebagai *supporting unit* harus mendukung pelaksanaan tugas pokok Mahkamah Agung dan tugas badan-badan peradilan secara mandiri, berkualitas dan penanganan perkara secara cepat (tepat waktu).

2. Tujuan.

Perumusan tujuan rencana strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Parigi untuk mengukur sejauh mana Visi – Misi organisasi yang tidak dicapai. Setiap tujuan strategis yang ditetapkan memiliki indikator kinerja yang terukur, rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan manajemen yang baik untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI).
- b. Meningkatkan pelayanan terhadap para pencari pencari keadilan.
- c. Mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang tepat waktu.
- d. Mewujudkan putusan / penetapan yang memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum tetap (final dan tuntas).
- e. Meningkatkan penyelesaian putusan yang dapat memberikan kepastian hukum.
- f. Meningkatkan pelayanan yang optimal dalam bidang penanganan administrasi perkara.

- g. Meningkatkan kinerja aparaturnya dan pelayanan publik.
- h. Meningkatkan pelayanan administrasi dan peningkatan SDM
- i. Mewujudkan pelayanan administrasi keuangan yang transparan dan akuntabel.
- j. Mewujudkan kedisiplinan dan ketaatan.
- k. Meningkatkan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
- l. Mewujudkan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum dan pelaporan.
- m. Mewujudkan penerapan teknologi informasi yang optimal pada semua bidang pekerjaan terkait.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, Pengadilan Negeri Parigi pada periode 2015-2019 telah menetapkan tiga program sebagai berikut :

1. **Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum,** dengan tujuan antara lain :
 - 1) Meningkatkan layanan publik khususnya dalam memberikan informasi mengenai keadaan perkara di Pengadilan Negeri Parigi;
 - 2) Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam menyelesaikan perkara dan mempublikasikan status perkara;
 - 3) Mempermudah aksesibilitas masyarakat dalam memperoleh informasi perkara dengan menampilkan data perkara secara online dengan metode pengisian data yang real time;
 - 4) Meningkatkan kinerja aparaturnya teknis peradilan dalam menangani perkara, dengan menyelesaikan perkara sesuai dengan batas waktu maksimal yang ditentukan;

- 5) Memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan;
- 6) Mempercepat proses penyelesaian perkara (tepat waktu) > 5 (lima) bulan;
- 7) Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum di Pengadilan Negeri Parigi;
- 8) Meningkatkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel khususnya mengenai informasi penyelesaian perkara;
- 9) Meningkatkan efektifitas penyelesaian administrasi perkara;
- 10) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan dan keadaan perkara di Pengadilan Negeri Parigi.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan operasional Pengadilan Negeri Parigi, yaitu :

1. Pemenuhan hak-hak Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Parigi berdasarkan ketentuan yang berlaku;
2. Pemenuhan kebutuhan operasional dan non operasional kantor;
3. Penataan dan pemeliharaan asset Barang Milik Negara (BMN);
4. Meningkatkan kinerja aparatur Pengadilan Negeri Parigi;
5. Meningkatkan layanan publik kepada masyarakat agar masyarakat yang berperkara merasa nyaman dan

meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan Pengadilan Negeri Parigi.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta layanan publik di Pengadilan Negeri Parigi, yaitu :

- 1) Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari;
- 2) Penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan layanan publik;
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana untuk menciptakan suasana kantor yang nyaman dan asri;
- 4) Penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi perkara di Pengadilan Negeri Parigi seperti perangkat IT, jaringan internet, dll;
- 5) Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan kantor, seperti taman, jalan, dll;
- 6) Penyediaan sarana dan prasarana untuk aparaturnya Pengadilan Negeri Parigi seperti rumah dinas dan mess.
- 7) Pengadaan Mesin dan Peralatan Kantor lainnya yang diperlukan, untuk menunjang peningkatan kinerja.

3. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2015-2019.

Sasaran rencana strategis Pengadilan Negeri Parigi tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Percepatan penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu dan kurang dari 5 bulan & Akuntabel;

- 2) Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap proses penyelesaian perkara;
- 3) Meningkatnya efektifitas penyelesaian administrasi perkara;
- 4) Meningkatnya layanan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu dan pemanfaatan IT untuk publikasi perkara;
- 5) Pengawasan yang berkualitas;
- 6) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran, transparansi dan akuntabel;
- 7) Pemanfaatan anggaran yang teralokasi dalam DIPA secara efektif dan efisien serta berdaya guna;

Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 terlampir pada matriks Rencana Startegi Pengadilan Negeri Parigi.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan dan Strategi Umum Pengadilan Negeri Parigi.

Program pembaruan peradilan dilaksanakan sejak dicanangkannya cetak biru (*blue print*) pada tahun 2003. Sejak saat itu banyak rekomendasi dari *blue print* yang telah diimplementasikan baik melalui dukungan dana APBN maupun dana bantuan lembaga donor. Pembaruan Peradilan untuk mengkoordinasikan berbagai program pembaruan dan mempercepat implementasi rekomendasi cetak biru pembaruan peradilan untuk mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung R.I dan lembaga peradilan yang ada di bawahnya .

Pengadilan Negeri Parigi terus berupaya dengan berbagai kegiatan pembaruan yang telah dilaksanakan, sedang berjalan maupun dalam tahap perencanaan, pada hakekatnya merupakan upaya Pengadilan Negeri Parigi untuk mencapai pengadilan yang modern. Modernisasi pengadilan Indonesia bukanlah semata-mata implementasi teknologi informasi saja namun juga modernisasi terhadap pola kelembagaan, manajemen organisasi dan SDM lembaga peradilan.

Terdapat beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja lembaga peradilan dan citra lembaga peradilan di mata masyarakat yang menjadi fokus peningkatan (*highlight*):

1. Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Keterbukaan informasi di lembaga peradilan telah dimulai dengan disahkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 144/KMA/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan Tanggal 28 Agustus 2007. Melalui acuan dalam SK KMA ini selanjutnya dilakukan berbagai kegiatan dengan tujuan utama untuk memudahkan masyarakat khususnya para pencari keadilan dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Saat ini beberapa kegiatan

yang dilakukan untuk menunjang implementasi SK KMA tersebut antara lain adalah upaya untuk menyediakan *website* serta layanan informasi agar seluruh informasi yang berkaitan dengan Pengadilan Negeri Parigi dapat di sampaikan secara terbuka dan akuntabel kepada masyarakat umum terutama mengenai penanganan perkara.

Selain itu diupayakan pula penyediaan meja informasi agar masyarakat dapat lebih mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan berdasarkan panduan yang dimuat dalam (SK KMA) Nomor. 144/KMA/VIII/2007. Selain itu meja ini juga difungsikan sebagai pintu masuk pengaduan masyarakat akan kinerja pengadilan sehingga pelapor dapat dengan mudah mengetahui status pengaduannya.

2. Program Reformasi Birokrasi.

Pada tahun 2007 telah dijelaskan latar belakang serta berbagai program reformasi birokrasi yang mulai dilaksanakan di Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga percontohan dalam program tersebut. Melalui peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Pedoman reformasi birokrasi pada intinya digunakan sebagai dasar kebijakan dalam menyusun rencana aksi serta mengimplementasikan kegiatan-kegiatan reformasi birokrasi di lembaga negara yang bersangkutan termasuk Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang ada di bawahnya salah satunya adalah Pengadilan Negeri Parigi.

Salah satu upaya yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Parigi dalam program reformasi birokrasi yaitu pengelolaan SDM dan peningkatan disiplin serta peningkatan kinerja aparatur Pengadilan Negeri Parigi.

3. Upaya Percepatan Implementasi Cetak Biru Pembaruan dan Peradilan, dan Pengembangan Lebih lanjut Dokumen Strategis Pembaruan dan Perencanaan Lembaga Peradilan.

Berbagai rekomendasi untuk dapat mewujudkan cetak biru pembaruan Mahkamah Agung R.I Pengadilan Negeri Parigi terus berupaya untuk menata, meningkatkan disiplin dan kinerja serta memprogramkan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu Pengadilan Negeri Parigi terus berupaya agar tenaga teknis dan para pegawai mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan Latihan agar dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Parigi. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat terus diupayakan untuk ditingkatkan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat umum namun sekarang ini Pengadilan Negeri Parigi masih belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Parigi.

Kebijakan Pengadilan Negeri Parigi adalah mendukung program reformasi *judicial*/ pembaharuan peradilan yang dilakukan Mahkamah Agung dapat berjalan seperti yang diharapkan. Strategi yang diterapkan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Parigi, antara lain:

1. Program Keterbukaan Informasi Pengadilan.

Sebagai tindaklanjut implementasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan Tanggal 28 Agustus 2007 dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Parigi, melalui kebijakan:

- a. Pembinaan dan penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi yang memadai secara bertahap.
- b. Pembinaan dan penyediaan pemenuhan kebutuhan SDM yang menguasai/ mempunyai latar belakang teknologi informasi.

- c. Pembinaan dan peningkatan koordinasi dengan unit kerja yang ada dalam lingkungan Mahkamah Agung dan pihak lain dalam bidang teknologi informasi sehingga penerapan teknologi informasi sebagai bagian dari *icon/ pilot project* reformasi birokrasi berjalan seperti yang diharapkan.
2. Program Pembinaan SDM.

Sebagai bagian perjalanan reformasi birokrasi, Pengadilan Negeri Parigi dalam melakukan pembinaan SDM telah melakukan kebijakan:

 - a. Pembinaan dan peningkatan tentang administrasi perkara dan administrasi umum.
 - b. Pembinaan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM.
 - c. Pembinaan dan peningkatan, serta promosi jabatan.
3. Program Manajemen Keuangan.

Sebagai bagian dari program reformasi *judicial* dan pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pengadilan Negeri Parigi telah melakukan kebijakan bidang manajemen keuangan, yaitu:

 - a. Pembinaan dan peningkatan koordinasi penganggaran di lingkungan Pengadilan Negeri Parigi.
 - b. Pembinaan dan peningkatan pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran.
 - c. Pembinaan dan peningkatan pengolahan aset/ barang milik negara.
 - d. Pembinaan dan peningkatan pengadaan barang dan jasa.
4. Program Organisasi.

Dalam menunjang program reformasi birokrasi, Pengadilan Negeri Parigi melakukan kebijakan, meliputi:

 - a. Pembinaan dan peningkatan koordinasi penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) dan tatalaksana.

- b. Pembinaan dan peningkatan fungsi dalam pembinaan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Renstra Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2015-2019 ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai rencana program Pengadilan Negeri Parigi untuk dapat mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Parigi. Sangat disadari bahwa Renstra ini belum tersaji secara sempurna, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak dapat memperoleh gambaran tentang renstra yang telah disusun oleh Pengadilan Negeri Parigi, dan akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan renstra ini agar terwujud cita-cita reformasi.

B. Saran-saran

Dengan disusunnya Renstra Pengadilan Negeri Parigi tahun 2015-2019 ini, diharapkan bisa terlihat program kerja yang direncanakan dan langkah strategis untuk dapat mewujudkan program Pengadilan Negeri Parigi. Untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat perbaikan dengan segala kerendahan hati sangat kami harapkan. Karenanya kami menyadari sepenuhnya bahwa renstra ini belum sempurna.



PENGADILAN NEGERI PARIGI

Jalan S. Pakabata No. Parigi

PARIGI - 94371

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PARIGI TAHUN 2015 - 2019 (REVIEW)

A. MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA

No	Tujuan	Program	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Ket
					2015	2016	2017	2018	2019	
1	Peningkatan Penyelesaian Perkara	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Percepatan penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu dan kurang dari 5 bulan & Akuntabel	a. Prosentase perkara yang diselesaikan termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat. b. Prosentase mediasi yang dilaksanakan dan diselesaikan. c. Prosentase mediasi yang berakhir dengan akta perdamaian. d. Prosentase penyelesaian perkara maksimal 5 bulan. e. Prosentase minutasi perkara yang telah diselesaikan.	90%	90%	93%	95%	95%	
2	Peningkatan Kepercayaan masyarakat terhadap penyelesaian perkara	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap proses penyelesaian perkara	Prosentase perkara yang tidak mengajukan banding & Kasasi & Peninjauan Kembali (PK)	90%	90%	93%	95%	95%	
3	Peningkatan efektifitas penyelesaian administrasi perkara	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Meningkatnya efektifitas penyelesaian administrasi perkara	a. Prosentase berkas perkara Banding, Kasasi, PK dan Grasi yang dinyatakan lengkap. b. Prosentase berkas perkara yang telah diregister dan telah didistribusikan kepada majelis hakim c. Prosentase penyampaian relas panggilan dan relas putusan yang tepat waktu dan tempat serta para pihak yang menerima.	100%	100%	100%	100%	100%	

4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Meningkatnya layanan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu dan pemanfaatan IT untuk publikasi perkara	a. Prosentase jumlah perkara prodeo yang diselesaikan b. Prosentase jumlah perkara yang telah dipublikasikan secara on line	100% 80%	100% 85%	100% 95%	100% 97%	100% 97%	
5	Peningkatan Kualitas Pengawasan	Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA-RI	Pengawasan yang berkualitas	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	
6	Peningkatan Profesionalisme Pengelolaan Anggaran	Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA-RI	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengeloan anggaran, transparasi dan akuntabel	Prosentase penyerapan anggaran yang tepat sasaran serta berdaya guna	90%	92%	95%	95%	96%	
7	Peningkatan penyediaan sarana dan prasana Pengadilan Negeri Parigi	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MA-RI	Pemanfaatan anggaran yang teralokasi dalam DIPA secara efektif dan efisien serta berdaya guna	Prosentase penyerapan anggaran belanja modal dan atau penyelesaian pekerjaan berdasarkan SPK atau kontrak	100%	100%	100%	100%	100%	

Mengetahui

KETUA PENGADILAN NEGERI PARIGI


EFRATA HAPPY TARIGAN, SH., MH.
NIP. 19680611 198903 1 004

PENGADILAN NEGERI PARIGI

Sekretaris,


SUNARTO MAIT, ST., MH.
NIP. 19781015 200502 1 004



PENGADILAN NEGERI PARIGI

Jalan S. Pakabata No. Parigi

PARIGI - 94371

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PARIGI TAHUN 2015 - 2019 (REVIEW)

B. MATRIKS KINERJA ANGGARAN

No	Tujuan	Program	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja (%)					Ket
					2015	2016	2017	2018	2019	
1	Untuk kesejateraan Hakim dan Pegawai serta dapat mewujudkan operasional kantor	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Mahkamah Agung	Tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Dalam Pelaksanaan Tugas Teknis Peradilan	Prosentase anggaran yang terserap	90%	92%	95%	95%	97%	
2	Untuk Menyediakan Sarana dan Prasarana Peradilan Yang memadai	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peradilan	Tersedianya Sarana dan prasarana peradilan yang memadai	Prosentase Realisasi Fisik / Realisasi Kontrak / SPK	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Untuk meningkatkan penyelesaian proses administrasi perkara dan penyediaan bantuan hukum serta percepatan penyelesaian administrasi perkara	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian administrasi perkara secara tepat waktu dan untuk membantu masyarakat tidak mampu dalam berperkara di pengadilan	Prosentase Anggaran Yang Terserap	75%	80%	90%	92%	95%	

Mengetahui

KETUA PENGADILAN NEGERI PARIGI

EFRATA HAPPY TARIGAN, SH., MH.

PENGADILAN NEGERI PARIGI

Sekretaris,

SUNARTO MAIT, ST., MH.